

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 6. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2013.

Departemen Pekerja Umum Direktorat Jendral Penataan Ruang. *Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya Cetakan ke-2*. Jakarta : Direktorat Jendral Penataan Ruang. 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1999.

Haw Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta : Rajawali Pers. 2003.

J. Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. 2007.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press. 2012.

Urip Santoso. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta : Kencana. 2012.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 2 tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto.

Peraturan Daerah Kota sawahlunto No. 7 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2004 – 2014.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya.

3. Sumber Internet

<http://Jdih.sawahluntokota.go.id>. *Sejarah Kota Sawahlunto*. Diakses pada tanggal 29 April 2015.

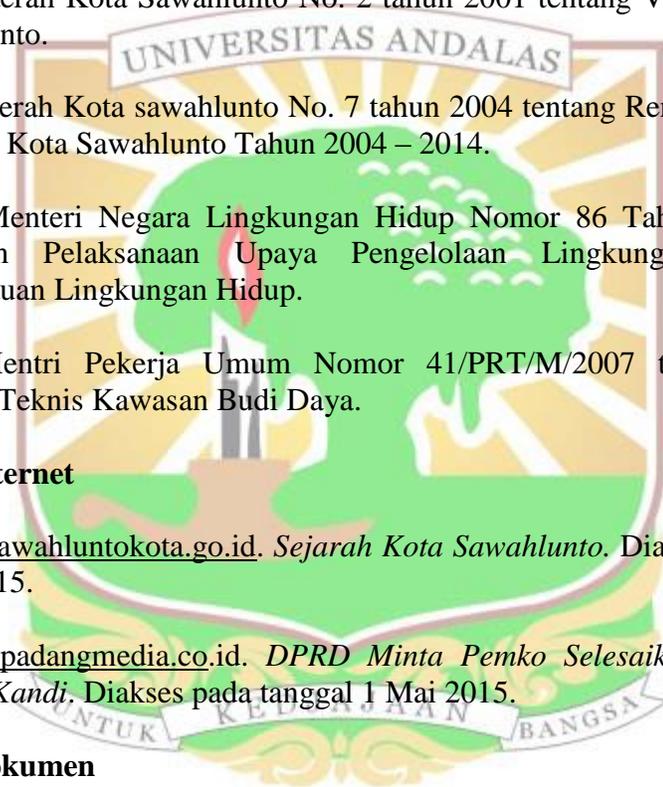
<http://www.padangmedia.co.id>. *DPRD Minta Pemko Selesaikan Status Tanah 393 Ha Di Kandi*. Diakses pada tanggal 1 Mai 2015.

4. Sumber Dokumen

Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Perencanaan Zonasi Bekas Tambang Kota Sawahlunto.

Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Sawahlunto 2004-20014.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) Taman Satwa Kandi dan Danau Tandikek.



Naskah Kesepakatan Bersama antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Terbuka Di Ombilin Nomor 002/0-3000/PKS/VI/2003 dan Nomor 180/5/HUK-ORG/2003.

Naskah Kesepakatan dan Perjanjian antara PT. tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Tentang Penyerahan Lahan Pasca tambang Terbuka Nomor 06/08.04/2400000002/XI-2004 dan Nomor 180/11/HUK-ORG/2004.

